

# **SKRIPSI**

## **TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR (STUDI KASUS: DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU)**



### **Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pada Fakultas Sains dan Teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh

**HENDRA PUTRA**  
**60800112028**

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini. Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka Skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2018  
Penyusun.

**Hendra Putra**  
NIM.60800112028



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Masyarakat Lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Desa Bawalipu Kecamatan Wotu)," yang disusun oleh Hendra Putra, NIM: 60800112028, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munagasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 27 Agustus 2018 M.  
15 Dzulhijjah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Risnawati K, S.T., M.Si	(.....)
Munagisy I	: Ir. Mahmudin, M.Si	(.....)
Munagisy II	: Juhanis, S.Sos	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Anshar S.Pt., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Risma Handayani S.Ip., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus : Desa Bawa Lipu Kecamatan Wotu)

Nama Mahasiswa : Hendra Putra

NIM : 60800112028

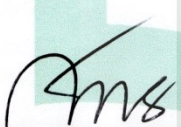
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si

  
Risma Handayani, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan  
Wilayah dan Kota



  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

  
Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si  
NIP. 19760603 200212 1 005



## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus: Desa Bawalipu Kecamatan Wotu)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana teknik perencanaan wilayah dan kota di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri “UIN” Alauddin Makassar.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan penulis sepenuhnya sadar, akan keterbatasan penulisan skripsi ini, banyaknya hambatan dan kendala yang penulis hadapi, namun berkat tekad dan kerja keras serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikannya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan Terimah Kasih kepada bapak Rektor UIN Alauddin Makassar dan Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Staf yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi.
2. Terkhusus kepada ke dua Orang Tua saya tercinta **Alwi Podo** dan **Fati Masang** yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi, serta do'a nya selama ini.

3. Kepada Kakak tercinta **Alfian Alwi, Misra Wati Alwi dan Syarifuddin Alwi** atas doa serta dorongan semangatnya.
4. Ketua dan Sekretaris jurusan serta seluruh dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota – FST UIN Alauddin Makassar.
5. Dewan Pembimbing (bapak **Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si** dan ibu **Risma Handayani, S.Ip., M.Si**) yang telah membimbing dengan penuh rasa ikhlas dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dewan Penguji (bapak **Ir. Mahmuddin, S.H., M.Si** dan **Juhanis, S.Sos., M.M**) yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tugas akhir (skripsi) ini.
7. Teman - teman saya yang telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini berlangsung.
8. Keluarga besar jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, terkhusus kepada rekan-rekan **Angkatan 2012 (PENTAGON)** yang senantiasa memberikan masukan kepada penulis dan menjadi saudara seperjuangan yang Insya Allah dunia akhirat.
9. Buat Senior dan Junior Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN.
10. Buat seluruh yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai insan biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu,

saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis jika skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Samata-Gowa, 14 Agustus 2018

**Hendra Putra**



## ABSTRAK

Nama : Hendra Putra  
Nim : 60800112028  
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Sains dan Teknologi

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Desa Bawalipu Kecamatan Wotu). Dan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur. Sumber data diperoleh dengan cara Survey, Observasi, dan Kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dari ke empat bentuk partisipasi (ide, tenaga, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan) tingkat partisipasi masyarakat lokal memiliki kategori tinggi dibandingkan dengan masyarakat transmigran pada bentuk tenaga dan evaluasi dengan skor masing-masing 2,7 dan 2,3. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat transmigran memiliki kategori tinggi dibandingkan lokal dalam bentuk sumbangan pemikiran dan pemanfaatan hasil dengan skor masing-masing 2,6 dan 2,3. Adapun yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal adalah faktor intern yang meliputi (kesadaran dan pendidikan). Faktor ekstern yang mempengaruhi adalah pemerintahan.

**Kata Kunci : Partisipasi, Transmigran, Pemanfaatan.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengembangan Wilayah .....	10
1. Pengertian Pengembangan Wilayah .....	10
2. Pengembangan Wilayah System <i>Top Down</i> .....	17
3. Pengembangan Wilayah System <i>Bottom Up</i> .....	18
B. Pengertian Kawasan Pedesaan .....	20
C. Pengertian Pembangunan Desa .....	22
D. Pengertian Masyarakat .....	28
1. Masyarakat .....	28
2. Transmigrasi .....	30
E. Partisipasi Masyarakat.....	32

1. Pengertian Partisipasi .....	32
2. Bentuk Pasrtisipasi .....	38
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	41
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pasrtisipasi Masyarakat.....	43
a. Faktor Pendukng.....	43
b. Faktor Penghambat .....	45
F. Penelitian Terdahulu .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
1. Analisis Deskriptif.....	51
2. Analisis Bivariat .....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Variabel Penelitian .....	54
H. Definisi Operasional.....	55
I. Kerangka Pikir .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Wotu.....	58
1. Keadaan Geografis.....	58
2. Kependudukan.....	59
3. Pendidikan.....	59
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
1. Letak dan Luas Wilayah Desa Bawalipu .....	62
2. Penduduk .....	62
C. Karakteristik Sampel.....	65
1. Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	65



2. Tingkat Pendidikan .....	66
3. Tingkat Penghasilan .....	68
D. Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran .....	69
1. Partisipasi Dalam Bentuk Non Fisik (ide) .....	69
2. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga .....	70
3. Partisipasi Dalam Bentuk Evaluasi dan Monitoring .....	71
4. Partisipasi Dalam Bentuk Pemanfaatan Hasil .....	72
E. Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran .....	73
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .....	74
1. Faktor Interen .....	75
a. Kesadaran .....	75
b. Pendidikan .....	76
2. Faktor Ekstern (Pemerintahan) .....	77
G. Keterkaitan Antara Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Islam...	79
BAB V PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel Penelitian.....	55
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	66
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel 5. Tingkat Penghasilan.....	68
Tabel 6. Partisipasi dalam Bentuk Non Fisik.....	69
Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Bentuk Tenaga.....	71
Tabel 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Bentuk Evaluasi dan Moitoring.....	72
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Bentuk Pemanfaatan Hasil .....	73
Tabel 10. Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran .....	74
Tabel 11. Tingkat Kesadaran Masyarakat Lokal dan Transmigran dalam Dalam Pembangunan Desa Bawalipu.....	75
Tabel 12. Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat Lokal dan Transmigran dalam Partisipasi Pemberian Ide.....	76
Tabel 13. Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat Transmigran dalam Partisipasi Pemberian Ide .....	76
Tabel 14. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dilihat Dari Faktor Kepemimpinan.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	57
Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Wotu .....	61
Gambar 3. Peta Administrasi Desa Bawalipu .....	63
Gambar 4. Peta Sebaran Penduduk Transmigran dan Lokal.....	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan pengembangan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan dan pengembangan. Peran serta masyarakat (Partisipasi) merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat dalam wacana pengembangan selalu berkaitan erat dengan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta nilai budaya dan agama setempat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quar'an Surah Al Maidah 5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Makna al-birru (الْبِرُّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى) dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, al-birru (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Tidak jauh berbeda, Syaikh as-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa al-birru adalah sebuah nama yang mencakup segala yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridhai, berupa perbuatan-perbuatan yang zhâhir maupun batin, yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jalla atau hak sesama manusia. Dari sini dapat diketahui, bahwa termasuk dalam cakupan al-birru, keimanan dan cabang-cabangnya, demikian pula ketakwaan.

Faedahnya:

Ulama mengatakan bahwa penggabungan kata al-birr dan at-taqwa dalam satu tempat (seperti ayat di atas) mengandung pengertian yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks ini, al-birr bermakna semua hal yang dicintai Allah dan diridhai-Nya,

baik berupa ucapan dan perbuatan, lahir dan batin. Sementara at-taqwa lebih mengarah kepada tindakan menjauhi segala yang diharamkan [al-Qawâid al-Hisân, Syaikh as-Sa'di.

Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَكَيْفَ مَظْلُومًا نَنْصُرُ هَٰذَا اللَّهُ رَسُولَ يَا قَالُوا مَا مَظْلُومٌ أَوْ ظَالِمًا أَخَاكَ انْصُرْ  
يَدِيهِ فَوْقَ تَأْخُذُ قَالَ ظَالِمًا نَنْصُرُهُ

Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.” [HR. al-Bukhâri] Dalam hadits lain, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَلَيْهِ كَفَا الْخَيْرَ عَلَى الدَّالِّ

“Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya”  
.[HR. Muslim]

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.



Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam bentuk tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor eksternal dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program pembangunan dan pengembangan suatu wilayah.

Kebijakan pemerintah tentang transmigrasi bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk serta diharapkan dengan adanya program transmigrasi tersebut transmigran yang ada di daerah tersebut dapat membangun, mengembangkan serta memperoleh lapangan pekerjaan yang baru. Pengembangan suatu wilayah semata-mata tidak hanya mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik.

Pembangunan dan pengembangan wilayah yang baik semestinya melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi secara menerus sebagai satu daur, ini biasa disebut daur pembangunan partisipatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang kelurahan pasal 12 ayat 4 yang berbunyi penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif dan juga dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga tertuang dalam UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 14, ayat 2 menjelaskan, bahwa Kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif.

Bentuk partisipasi masyarakat relatif bervariasi antara satu dengan yang lain. Bentuk partisipasi tersebut misalnya partisipasi dalam bentuk pemikiran/ide, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pembangunan dan ada pula yang partisipasi dalam bentuk materi dan uang tunai. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Masyarakatlah sebagai pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Selain ketidaksesuaian antara masyarakat dengan

pemerintah dalam pembangunan ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat tidaknya suatu daerah mengalami perkembangan salah satu diantaranya adalah status masyarakat itu sendiri.

Status masyarakat (masyarakat lokal atau transmigran) berpengaruh terhadap perkembangan disuatu daerah khususnya pedesaan. Kemungkinan hal ini dikarenakan adanya perbedaan pola pikir antara kedua masyarakat tersebut sehingga mengakibatkan terlambatnya suatu pembangunan dan pengembangan daerah.

Hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan adanya perbedaan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat transmigran di Desa Bawalipu pada saat pelaksanaan program aksi kali bersih (AKASI) hal ini diperlihatkan dengan adanya perbedaan jumlah masyarakat lokal yang relatif lebih banyak dibandingkan masyarakat transmigran dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **"Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran Dan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus: Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur)."**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah Di Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur?

2. Mengapa terjadi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah Di Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah Di Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah Di Desa Bawalipu Kabupaten Luwu Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis:

Untuk dapat mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan Perencanaan Wilayah dan Kota, utamanya partisipasi masyarakat. Serta sebagai mediasi menuangkan berbagai hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan sebuah karya ilmiah.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah di kelurahan dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Lokal dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Luwu Timur

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkupnya yaitu;

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemamfaatan hasil pembangunan
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk evaluasi

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bab ini berisi tentang pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **KEDUA**

Bab ini membahas tentang kajian teori yang menjadi landasan, antara lain yaitu pengertian pengembangan wilayah, pengertian kawasan pedesaan, pengertian pembangunan desa, pengertian partisipasi, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi dan penelitian terdahulu.

### **KETIGA**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional dan kerangka fikir.

### **KEEMPAT**

Bab ini membahas tentang gambaran umum kecamatan wotu, gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik sampel, tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal, perbandingan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal, dan pembahasan.

### **KELIMA**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengembangan Wilayah**

##### **1. Pengertian Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, *et al.* (2011) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk

kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi *et al.*, 2011) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2010) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi: 1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/*homogenitas*. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik. 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan. 3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Hartoyo, dkk (1996) menyatakan bahwa wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah

pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Ndraha T (1990), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need*

*approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Nugroho, 2005).

Arianto (2001) menyatakan bahwa pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Pendapat lain bahwa pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga mempengaruhi timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini termasuk mencari peluang yang ada dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak semuanya mempunyai potensi yang sama (Kuncoro, 2010).

Prod'homme dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan

memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Pendapat lain menyebutkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbedaantara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang bersangkutan (Sumaryadi, 2010).

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan danlainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Triutomo, 2001).

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 2008).

Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tertentu seperti (Friedman *and* Allonso, 2008):

a) *Sumber daya lokal.*

Merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumber daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut.

b) *Pasar.*

Merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang.

c) *Tenaga kerja.*

Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.



d) *Investasi.*

Semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.

e) *Kemampuan pemerintah.*

Pemerintah merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan.

f) *Transportasi dan Komunikasi.*

Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.

g) *Teknologi.*

Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan (*people property*) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan

ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan.

## **2. Pengembangan Wilayah Sistem *Top Down***

Sistem pengembangan wilayah di Indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara *top down*, baik kebijakan perluasan wilayah administratif maupun pembentukan wilayah kawasan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembentukan kawasan khusus yang mengutamakan landasan kepentingan nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik. Dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanakan secara *top down* (Abdurrahman, 2005).

Rondinelli dalam Rustiadi (2006) mengidentifikasi tiga konsep pengembangan kawasan, yakni (1) konsep kutup pertumbuhan (*growth pole*), (2) integrasi (keterpaduan) fungsional-spasial, dan (3) pendekatan *decentralized territorial*. Di Indonesia konsep *growth pole* dirintis mulai tahun delapan puluhan yaitu dengan menekankan investasi massif pada industri-industri padat modal di pusat-pusat urban terutama di Jawa di mana banyak tenaga kerja dengan harapan dapat menciptakan penyebaran pertumbuhan (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Indikator ekonomi nasional sangat bagus hingga tahun 1997, namun dampaknya bagi pembangunan daerah lain sangat terbatas. Kenyataannya teori ini

gagal menjadi pendorong utama (*prime over*) pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah penyerapan daerah sekelilingnya dalam hal bahan mentah, modal, tenaga kerja dan bakat-bakat *entrepreneur*. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar daerah.

Perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma *top down* (sentralistik) tidak dapat membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara bertahap berubah menjadi sistem *bottom up*, dimulai sejak tahun 1998 dengan diundangkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 yang baru diaplikasikan pada tahun 2001. Perubahan dari paradigma sentralistik pasca otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai beralih pola ke arah *bottom up*. Peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural, berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural administratif terhadap hirarki yang di atasnya.

### **3. Pengembangan Wilayah Sistem *Bottom Up***

Pendekatan teknis kewilayahan melalui pendekatan homogenitas atau sistem fungsional mengalami proses yang lebih kompleks karena pelaksanaannya meliputi aspek kesepakatan atau komitmen para aktor regional dalam memadukan kekuatan endogen (Abdurrahman, 2005). Kemudian Rustiadi (2006) menambahkan bahwa konsep integrasi fungsional-spasial seperti yang pernah dicetuskan oleh Rondinelli berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran

dan karakteristik fungsional secara terpadu perlu dikembangkan untuk memfasilitasi dan memberi pelayanan regional secara lebih luas.

Salah satu bentuk konsep ini adalah wilayah agropolitan yang dirancang pertama kali oleh Friedman, Mc Douglas, 1978 yang merupakan rancangan pembangunan dari bawah (*development from below*) sebagai reaksi dari pembangunan *top down* (*development from above*). Agropolitan merupakan distrik atau region selektif yang dirancang agar pembangunan digali dari jaringan kekuatan lokal ke dalam yang kuat baru terbuka keluar (Sugiono, 2002).

Namun dimensi ruang (*spatial*) memiliki arti yang penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (*planning*) yang berwawasan keruangan memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah dapat diwujudkan, dengan memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Riyadi dalam Ambardi, 2002).

Sebagai suatu sistem yang kompleks perlu intervensi isolasi dalam proses integrasi kedalam dengan kontrol dan subsidi yang mencegah proses infiltrasi dariluar (Sugiono, 2002). Namun karena penerapan program agropolitan yang berjalan seiring dengan proses globalisasi maka proteksi wilayah sulit dilakukan. Jadi ada dua sisi yang saling tarik menarik dan keduanya juga saling bertolak belakang. Di mana satu

sisi dibutuhkan kemandirian dalam mengembangkan wilayah sementara disisi lainnya dibutuhkan proteksi atau kekuatan central agar satu dan lain hal dapat dikondisikan untuk mencapai tujuan yang ideal. Sementara itu hal lain yang juga berpengaruh besar adalah adanya kekuatan globalisasi yang tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur segala sesatunya sesuai dengan konsep yang dicanangkan. Ada beberapa perubahan yang terjadi sesuai dengan berjalannya proses pembangunan itu sendiri.

## **B. Pengertian Kawasan Pedesaan**

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kata kawasan sendiri dapat diartikan sebagai wilayah dengan fungsi utama adalah lindung ataubudidaya, sedangkan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Suwandi (2005:21), desa selama ini diartikan sebagai struktur pemerintahan dan tidak pernah ditonjolkan desa sebagai aset nasional, asset perekonomian nasional. Desa tiada lain adalah kawasan fungsional dengan cirri kegiatan utama adalah sektor pertanian.

Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Menurut Bergel (1955:121), desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”.

Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Koentjaraningrat (1977:162), memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: *band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai *“komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”*. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam tidak disektor pertanian saja.

Landis (1948:12-13), Mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

### C. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut buku panduan persatuan bangsa-bangsa dalam Hartoyo dkk. (1996:6) pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa swasembada.

Beratha (1992:7) pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Kedua definisi tersebut diatas di analisis sesuai dengan semangat pembangunan dikawasan pedesaan, yang mengutamakan semangat tumbuh dari dalam untuk dan berkembang yang secara mandiri, tidak menunggu uluran tangan dari luar. Dengan demikian, dalam gerak derapnya pembangunan masyarakat desa, desa tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan, melainkan menjadi subjek dalam pembangunan. Sementara itu, garis-garis besar perencanaan pembangunan lima tahun menyebutkan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan melakukan pembangunan yang integral dari masyarakat,



berdasarkan azas kekuatan sendiri dari masyarakat dengan pembimbing serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebutuhan) dalam rangka kebijaksanaan bersama.

Azas pembangunan integral dimaksudkan ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan perumahan dan sebagiannya) sehingga menjamin suatu pembangunan yang selaras dan tidak berat sebelah. Azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu pemberian dari pemerintah. Sedangkan azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan yang besar-besar dirasakan sebagai kekuatan oleh anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan itu melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan perintah atasan, melainkan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Ndraha (1990:3) memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang pembangunan sebagai berikut “pembangunan sebagai suatu proses dimana masyarakat berkenan mengambil bagian secara aktif (berpartisipasi) dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan. Pendapat tersebut diatas apabila kita analisa berdasarkan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan yang harus dilakukan adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah (*bottom up*) implikasinya, aspirasi dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting proses perencanaan, implementasi dan evaluasi serta kontrol terhadap dan kebijakan pemerintah daerah termasuk hal penggalan dana dan alokasinya.



Berdasarkan batasan atau konsep pembangunan desa yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, maka pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berencana untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu atau sebagian masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya dalam realisasi pembangunan desa baik pelaksanaan proyek - proyek pembangunan yang bersifat fisik manfaatnya konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia masyarakat.

Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006:18-20):

- 1) Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (*sustainable*)
- 2) Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
- 3) Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja,

kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*).

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan desa. Pemerintah kabupaten wajib melakukan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. menurut Ndraha (1990:71) membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif. Sedangkan menurut Batten, pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ndraha, 1990:72). Tetapi dalam menentukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu menurut *Butterfield* dalam *Ndraha*, 1990:70) adalah :

- a) Perbedaan persepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dipedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya.
- b) Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru sehingga pemerintah pun menjadi bingung dalam

menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.

- c) Batasan waktu, dimana pembangunan pedesaan lambat sekali kelihatan hasilnya sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.
- d) Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tarap pelaksanaannya membuat pembangunan desa terlambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih dan sebagainya. memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan di desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

Pengertian pembangunan desa menurut Adisasmita (2006), bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Menurut Sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20), pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012). Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001 :47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah.

Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yumono (2001 : 54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

- a) Pembangunan bidang keagamaan
- b) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
- e) Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dari pendapat tersebut diatas, dapat pula disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat.

## **D. Pengertian Masyarakat**

### **1. Masyarakat**

Berdasarkan ilmu etymologi yang mempelajari asal usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan berasal dari kata musyarak yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut

dengan society. Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

Pengertian masyarakat dari beberapa ahli ; menurut Peter. L. Berger masyarakat adalah suatu bagian-bagian yang membentuk kesatuan hubungan antar manusia yang bersifat luas, Marx berpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya. Berbeda dengan pendapat Harold. J. Laski, masyarakat itu adalah kelompok manusia yang bekerjasama dan hidup demi mencapai terkabulnya keinginan mereka bersama

Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama.

Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun.

Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa Kecamatan lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara.

## 2. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru (Martono dalam Swasono;1986).

Tujuan transmigrasi diantaranya ; Pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan penduduk di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah, Membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah baru, Membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan di daerah baru. Jenis – jenis transmigrasi, diantaranya ;

### a. Transmigrasi Umum (TU)

Transmigrasi Umum yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi (proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan) menjadi



tanggung jawab pemerintah, sedangkan transmigran mendapat bantuan bila perlu mendapat subsidi dari Pemerintah.

b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB),

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yaitu transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Usaha. Peranan Pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitrausahaan Badan Usaha dengan transmigran berjalan setara, adil dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan.

c. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM),

Transmigrasi swakarsa mandiri yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran yang bersangkutan.

Selanjutnya pada masa Orde Baru transmigrasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

a. Transmigrasi Umum (TU)

Transmigrasi Umum yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (umumnya pola tanaman pangan di lahan kering dan di lahan basah).

b. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB)

Transmigrasi swakarsa berbantuan yang sebagian dibiayai oleh pemerintah (umumnya untuk prasarana), dan sebagian lagi dibiayai oleh Pengusaha melalui Kredit Koprasi Para Anggota (KKPA).



c. Transmigrasi Swakrsa Mandiri (TSM)

Transmigrasi swakarsa mandiri yang dibiayai sepenuhnya oleh transmigran, sedangkan pemerintah menyediakan lahan seluas dua hektar/Kepala Keluarga.

d. Transmigrasi Pola Agro Estate (PIR-Trans Mandiri)

Transmigrasi pola agro estate yang merupakan bentuk perkebunan yang dikelola secara agribisnis.

## **E. Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi**

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta, maka dapat dikatakan kalau partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar (Darmawi, 2014). Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar (Adisasmita 2006). Ndraha (1982) yang merujuk pada Cohen (1977) menyatakan bahwa belum ada definisi yang memuaskan mengenai istilah partisipasi, oleh karena itu mereka membatasinya pada *development participation* atau partisipasi di bidang pembangunan, ini berarti partisipasi (aktif) masyarakat di bidang pembangunan desa. Nasdian (2014) menjelaskan bahwa partisipasi mendukung masyarakat untuk memulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari

jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis).

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (Pasaribu, 1992:17). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga social dalam masyarakat.

Pasaribu (1992:17) mengemukakan sebagai berikut: (1) rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertibaan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi; (2) keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal rumput tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan; (3) kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi; (4) adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi; dan (5) iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai yang dilarang dari atas. Nelson dalam Kumorotomo (1999:112) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), partisipasi

kelompok (*group participation*), kontak antara warga Negara dan pemerintah (*citizen government contacting*) dan partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masa dalam hal ini ditunjukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Partisipasi kelompok (*group participation*). Warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan antisipasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi kemiskinan, mengadukan penyelewengan administrasi kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan sekelompok individu yang sama.

Kontak antara warga Negara dan pemerintah (*citizen government contacting*). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga dengan pemerintah dengan cara menulis surat, atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga sebuah kota, atau lokal karya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Partisipasi warga Negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Keith Davis, 1962) dalam Sastropetro (1998: 12). Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: “(*sense of belonging*)” (Sastropetro, 1998:14).

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Slamet (1999:66) menyebutkan dua macam partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis secara pemungutan suara, kampanye dan sebagainya disebut sebagai

partisipasi dalam proses politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif.

Konsep partisipatif mengandung makna luas dan arti yang amat dalam, dimana pada proses pembangunan partisipasi itu berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Slamet (1999: 84) membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yang didasari pada sembilan dasar yang satu sama lain jarang terpisahkan dalam banyak hal, mengidentifikasi suatu kegiatan partisipasi yang ada dari Sembilan tipe yang ada. Dalam setiap klasifikasi menunjukan dua macam partisipasi yang diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi "label baru" yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan; (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan ikutserta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik (*political participation*), partisipasi lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses - proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sengaja keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik diarahkan sebagai bahan pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), menekan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “ dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma, kaum tersisi” menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Bedasarkan uraian pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

## **2. Bentuk Partisipasi**

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998:16) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) konsultasi dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggaranya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (f) aksi masa; (g)



mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri; (h) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan syarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) mewujudkan tujuan prioritas yang ingin dicapai (Sastropetro, 1998:17)

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai mana dirangkum Ndraha (1990: 44) berikut ini: (1) partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (*contact change*) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan; (2) partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desain proyek; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan



mengembangkan hasil pembangunan yang disebut “*participation in benefittcs*”; (6) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huraira (2008) menyatakan bentuk partisipasi adalah sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).

Cohen dan Uphoff (1977) dalam Girsang (2011) membagi partisipasi kedalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

1. Bentuk pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
2. Bentuk pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam

partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.

3. Bentuk pengawasan/menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
4. Bentuk evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Berbagai bentuk, jenis dan model-model partisipasi seperti disebutkan diatas dapat diimplementasikan apabila implementor (*public actors dan social actors*) memperhatikan secara sungguh-sungguh intensif-intensif materil sekaligus moral yang dapat dipetik sebagai buah dari partisipasi yang mereka berikan. dalam konteks ini faktor-faktor yang sangat berpengaruh baik secara psikologis maupun kultural terhadap kualitas partisipasi yang berpengaruh secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

### **3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut partisipasi. Sehingga untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi.

Menurut *Asia Development Bank* (ADB) tingkatan partisipasi dari yang terendah sampai tertinggi sebagaimana disebutkan bahwa berbagi informasi bersama (sosialisasi) maksudnya pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut. Konsultasi/ mendapatkan umpan balik, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Adanya timbale balik dari masyarakat harus diutarakan kepada pemerintah. Karena tingkat kekurangan suatu program akan tahu pada siapa yang menjalankan dalam hal ini masyarakat harus ada respon yang positif dari semua kalangan agar pemberdayaan yang dilakukan berhasil.

Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan. Kalau pembuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif rasa kepedulian dan kepemilikan tidak ada. Pemberdayaan/kendali, masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

##### **a. Faktor Pendukung**

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- Faktor Kesadaran/Kemauan

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat, hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

- Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

- Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

- Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

- Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

- Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada

partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pemerintah selaku penguasa amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakat untuk menghibau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.

- Peralatan/Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

#### **b. Faktor Penghambat**

Upaya mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi baik yang bersifat normal maupun bersifat informal, maka yang menjadi faktor pertimbangan pokok adalah tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pendirian organisasi itu belum tercapai atau sangat sulit dicapai itulah yang menjadi hambatan. Hambatan

atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada kendala penting dalam partisipasi (Bappenas, 2001) yaitu :

- Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang merasa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi suatu pembangunan, pola pikir yang tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- Waktu

Masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.

- Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan, sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas.

Peluang usaha di sektor non pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan tahun 2011 dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Pada penelitian ini menunjukkan kurang berpengaruhnya faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Karena masyarakat sibuk bekerja untuk mencari kehidupan sehari-hari dan juga masyarakat beranggapan pembangunan adalah tugas pemerintahan daerah kabupaten. Sehingga mereka merasa dimanjakan oleh pembangunan yang sudah ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugih Mulyana tahun 2013 dengan judul partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Pada penelitian tersebut menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: usia, dimana usia yang dominan. Berdasarkan penelitian yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/penghasilan, dan lamanya tinggal.



Penelitian yang dilakukan oleh Sutami tahun 2009 dengan judul partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara pada penelitian tersebut menunjukkan adanya antusiasme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan dalam berbagai bentuk. Keikutsertaan responden pada setiap tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa responden sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PPMK. Indikasi adanya kerjasama ini, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (partnership), sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat therapy.

Penelitian Megawati (2008) yang dilakukan dalam bentuk disertasi di Universitas Padjadjaran dengan judul: partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kelurahan di kotamadya Jakarta Selatan), partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontibusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

Penelitian Hendryk (2013). Dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa partisipasi masyarakat pada

pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada *setting* penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kualitatif dengan metode deskriptif yakni dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat Penelitian dilaksanakan di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

##### **C. Populasi dan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bawalipu yang ada di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 1.459 KK, dimana masyarakat lokalnya berjumlah 1.346 KK dan masyarakat transmigran berjumlah 113 KK.

###### **2. Sampel**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan “*Metode purposive sampling*” (pengambilan sampel dengan tujuan tertentu) yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi (Sugyono, 1998). Sehingga dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampel masyarakat transmigran

sebanyak 53 responden dan masyarakat lokal sebanyak 93 responden dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen toleransi 10%

#### **D. Teknik Analisis Data**

##### **1. Analisis Deskriptif**

Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka digunakan analisis deskriptif. Data yang di kumpulkan akan di analisis secara kuantitatif kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada analisis kualitatif, kata-kata di bangun dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk di deskripsikan dan dirangkum. Analisis tersebut di dukung oleh tabel frekuensi pada beberapa variable pendukung yang di jadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan dengan tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala. Adapun rumus yang digunakan (Sumber: Pasaribu dalam Melis, 2016) adalah :

1) Nilai Skor = Frekuensi x Nilai Bobot

2) Rata-rata Skor =  $\frac{\text{Nilai Skor}}{N}$

Berdasarkan perhitungan hasil analisis partisipasi masyarakat dan berbagai usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat dilihat dengan menggunakan Rentang Skala Nilai Mutu dengan sebutan sebagai berikut:

- 1) Tinggi :  $> 3$
- 2) Sedang :  $2 - 3$
- 3) Rendah :  $< 2$

*Keterangan :* Jika nilai yang diperoleh  $>3$ , maka tingkat partisipasi tergolong tinggi, Jika nilai yang diperoleh  $2-3$ , maka tingkat partisipasi tergolong sedang dan Jika nilai yang diperoleh  $<2$ , maka tingkat partisipasi tergolong rendah.

Kategori diatas diperoleh berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi dengan menentukan:

1. Rentang kelas (R)

$$R = \text{nilai Max} - \text{nilai Min}$$

2. Banyak Kelas (K)

$$K = 1 + (3,3) \log n$$

3. Interval Kelas

$$p = \frac{\text{Range}}{\text{banyak kelas}}$$

## 2. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat transmigran dan lokal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *chi square* untuk melihat sejauh mana

keterkaitan antara faktor (kesadaran dan pendidikan) terhadap bentuk partisipasi masyarakat. Uji ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS V.21*. Hasil yang diperoleh pada analisis chi square dengan program SPSS yaitu nilai  $p < 0,05$  maka ada hubungan atau perbedaan antara dua variabel tersebut Agung 1993 ).

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1) Data primer.**

Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian dengan cara melaksanakan observasi terhadap berbagai macam pelaksanaan pembangunan, dan wawancara dengan menggunakan kuisioner kepada responden.

Data primer antara lain: tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berupa pelaksanaan gotong royong, pengawasan, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

##### **2) Data sekunder.**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen - dokumen instansi yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi : luas wilayah, data penduduk, fasilitas desa yang tersedia.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Dokumentasi Sumber tertulis (Dokumentasi) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi - instansi pemerintah yang terkait.
3. Kuisioner, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat partisipasi masyarakat.

#### **G. Variabel Penelitian**

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, diperoleh beberapa variabel terpilih yang dapat mendukung proses penelitian. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1. Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian		
Tingkat Partisipasi Masyarakat	Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Masyarakat	Pengembangan Wilayah
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan</li> <li>- Tahap pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Tahap evaluasi</li> <li>- Tahap pemanfaatan hasil pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor interen (kesadaran, pendidikan)</li> <li>- Faktor eksteren (pemerintahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPJMD</li> <li>- Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa</li> </ul>

## H. Definisi Operasional

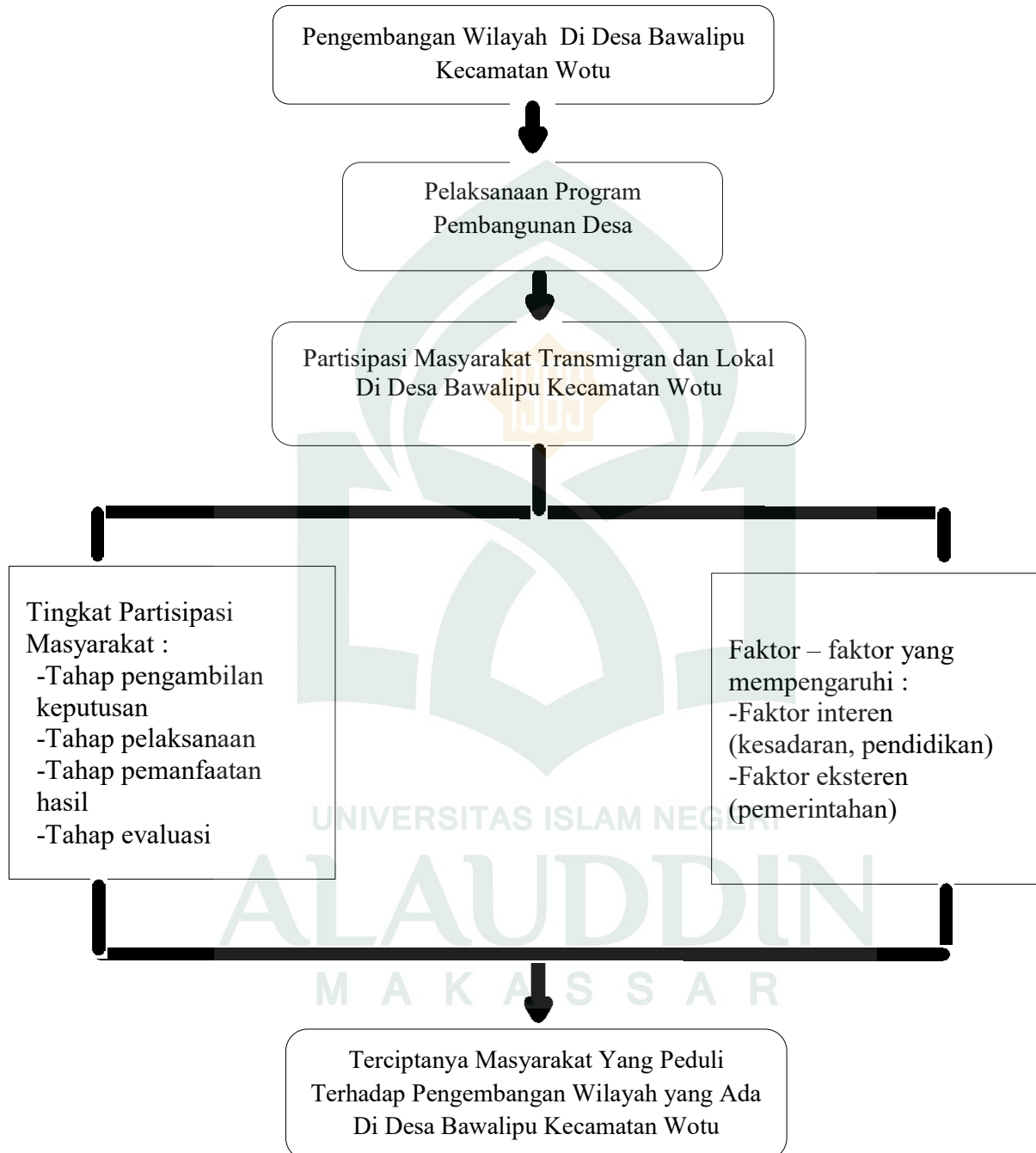
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah pembangunan fisik, maka perlu adanya batasan penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :
  - a. Tahap pengambilan keputusan, merupakan partisipasi berupa buah pemikiran atau pendapat, baik untuk proses perencanaan maupun untuk memperlancar program pembangunan.
  - b. Tahap pelaksanaan kegiatan, merupakan partisipasi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.



- c. Evaluasi, evaluasi yang dimaksud yaitu masyarakat ikut memonitor kesesuaian perencanaan/pelaksanaan
  - d. Pemanfaatan hasil yang dimaksud yaitu masyarakat menilai penting keberadaan hasil-hasil pembangunan desa.
2. Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan pedesaan dalam penelitian ini adalah;
- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD)  
Penyusunan RPJMD yang dimaksud adalah pembahasan dan penyusunan program kerja desa.
  - b. Pemanfaatan hasil pembangunan desa  
Pemanfaatan hasil pembangunan desa yang dimaksud adalah jaringan drainase, WC umum, pelebaran jalan, dan lain - lain.
3. Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat transmigran dan masyarakat lokal, dimana masyarakat lokal yang dimaksud adalah masyarakat yang nenek moyangnya adalah asli masyarakat di daerah tersebut sedangkan masyarakat transmigran yang dimaksud adalah masyarakat yang nenek moyangnya bukan asli dari daerah tersebut.

## I. Kerangka Pikir



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Wotu**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 130,52 km<sup>2</sup> atau meliputi 1,88 persen dari luas Kabupaten Luwu Timur. Desa Lampenai merupakan desa yang memiliki wilayah yang terluas yaitu 22,31 km<sup>2</sup> atau meliputi 17 persen dari luas Kecamatan. Secara administrasi Wotu terbagi menjadi 16 desa yaitu, Desa Lera, Bawalipu, Lampenai, Bahari, Kalaena, Karambua, Kanawatu, Maramba, Tarengge, CendanaHijau, Balo-Balo, Pepuro Barat, Rinjani, Madani, Tarengge Timur dan Tabaroge. Secara Astronomis Kecamatan Wotu terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur tepatnya terletak diantara 2<sup>0</sup> 31' 58" – 2<sup>0</sup> 39' 57" Lintang Selatan dan 120<sup>0</sup> 45' 20" – 120<sup>0</sup> 55' 38" Bujur Timur. Kecamatan Wotu berbatasan dengan Kecamatan Tomoni di sebelah utara, Kecamatan Angkona sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Burau. Kecamatan Wotu terdiri dari 16 desa yang seluruhnya berstatus desa definitive dengan 70 dusun dan 191 RT.

Sebagian wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah pesisir. Lima dari 16 desanya merupakan wilayah pantai dan 11 desa merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah

datar, karena keenambelas desanya merupakan daerah datar dan tidak ada yang daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.

## **2. Kependudukan**

Kepadatan penduduk di Kecamatan Wotu tergolong tinggi yaitu sekitar 233 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Lera dengan kepadatan 692 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Balo-Balo dengan kepadatan sebanyak 83 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Wotu sebanyak 30.386 jiwa yang terbagi kedalam 6.894 rumahtangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 4 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jumlah Penduduk laki-laki sebanyak 15.377 orang dan perempuan sebanyak 15.009 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 102 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 102 orang laki-laki.

## **3. Pendidikan**

Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, oleh karena itu pemerintah harus menjamin mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Wotu termasuk kategori memadai. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia dan terdistribusi di setiap desa. Pada tahun 2016,

jumlah TK di Kecamatan Wotu sebanyak 19 sekolah dan SD sebanyak 22 sekolah. Selanjutnya jumlah SLTP dan SLTA masing-masing sebanyak 8 dan 3 unit.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Letak dan Luas Wilayah Desa Bawalipu

Secara geografis desa bawalipu terletak  $\pm 47,5$  km<sup>2</sup> dari ibu kota kabupaten Luwu Timur dan memiliki luas wilayah 20,03 km<sup>2</sup>. Adapun batas – batas wilayah Desa Bawalipu yaitu;

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lampenai

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni

Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau

### 2. Penduduk

Desa Bawalipu memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.278 jiwa yang terdiri dari 3.068 jiwa laki – laki dan 3.210 jiwa perempuan.

**Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin di Desa Bawalipu**

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Saluborro	836	901	1737
2	Salualla	9	84	174
3	Sambote	853	859	1712
4	Lengkong	461	506	967
5	Campae	828	880	1688
	jumlah	<b>3068</b>	<b>3210</b>	<b>6.278</b>

Sumber: Data BPS LuTim 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### **C. Karakteristik Sampel**

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan peneliti dengan memilih responden yang mengetahui tingkat partisipasi masyarakat lokal maupun transmigran dalam menunjang pengembangan wilayah di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, dengan jumlah sebanyak 93 responden masyarakat lokal dan 53 responden masyarakat transmigran. Responden dalam penelitian ini mempunyai latar belakang berbeda-beda baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun pekerjaan.

#### **1. Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Struktur umur penduduk penting untuk diketahui karena struktur umur penduduk dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan mengetahui struktur umur, kita dapat mengetahui penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja. Struktur umur penduduk lokal dan transmigran di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Penduduk		Presentase (%)	
	Lokal	Transmigran	Lokal	Transmigran
< 30	13	7	14	13
30-50	71	39	76	74
> 50	9	7	10	13
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Analisis Data

Karakteristik umur responden berdasarkan umur pada penduduk lokal diperoleh rata-rata sekitar 30-50 tahun dengan presentasi 76%. Begitupun pada penduduk transmigran diperoleh rata-rata umur sekitar 30-50 tahun dengan presentase 74%.

Data diatas menunjukkan bahwa dari 146 responden yang terdiri dari 93 responden penduduk lokal dan 53 responden transmigran berada pada tingkat usia reproduktif, dimana pada usia tersebut sangat diharapkan sekali bahwa jawaban atau penilaian yang diberikan responden pada koesioner yang diberikan penulis benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi atau sementara berlangsung selama ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah pedesaan di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan pembangunan disuatu daerah dan sekaligus menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Pendidikan berhubungan dengan kualitas sumber daya

manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat kualitas SDM suatu daerah, maka daerah tersebut cenderung akan memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang lebih tinggi.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Tingkat Pendidikan	Penduduk		Presentase (%)	
	Lokal	Transmigran	Lokal	Transmigran
Tidak Tamat SD	9	12	10	23
Tamat SD	22	11	24	21
Tamat SLTP	21	16	23	30
Tamat SLTA	28	10	30	19
Sarjana	13	4	13	7
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisi Data.

Tingkat pendidikan responden berdasarkan table 4. sangat bervariasi di mulai dengan tidak tamat SD sampai tingkat Sarjana. Pada penduduk lokal responden tamat SLTA menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya yakni mencapai 28 orang dengan presentase 30%. Sedangkan pada penduduk transmigran frekuensi tamat SLTP lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya yakni sebanyak 16 responden dengan presentase 30%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat

Desa Bawalipu masih kurang, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya ialah kurangnya kesadaran yang ada pada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

### 3. Tingkat Penghasilan

Keadaan pendapatan masyarakat lokal dan transmigran di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur

**Tabel 5. Pendapatan Masyarakat Lokal dan Transmigran di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Tingkat Pendapatan	Penduduk		Presentase (%)	
	Lokal	Transmigran	Lokal	Transmigran
< 1.000.000	6	2	6,5	4
1.000.000-2.000.000	53	33	57,0	62
>2.000.000	34	18	36,5	34
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis Data.

Dari data pendapatan responden diatas dapat dilihat bahwa pada penduduk lokal di Desa Bawalipu sebanyak 53 responden mempunyai penghasil paling tinggi sebesar 1.000.000-2.000.000, dan 6 responden memiliki penghasilan dibawah 1.000.000/bulan. Sedangkan penduduk transmigran sebanyak 4 orang memiliki penghasilan dibawah 1.000.000, dan 33 orang berpenghasilan 1.000.000-2.000.000/bulan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Bawalipu baik lokal maupun transmigran berada pada kisaran 1.000.000-2.000.000.

#### **D. Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran dalam Pengembangan Desa Bawalipu**

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari adanya partisipasi anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan system maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang terpenting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

##### **1. Partisipasi dalam Bentuk non fisik ( Ide/Pemikiran)**

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsi pemikiran di Desa Bawalipu dalam pembangunan, maka dapat dilihat pada tabel dbawah ini:

**Tabel 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bawalipu dalam Bentuk Sumbangan Pemikiran**

<b>Kategori (Nilai)</b>	<b>Masyarakat</b>	
	<b>Lokal Frekuensi (Persentasi)</b>	<b>Transmigran Frekuensi (Persentasi)</b>
Rendah (1 – 5)	-	-
Sedang (6 – 10)	38 (40,9%)	20 (37,7%)
Tinggi (11 – 15)	55 (59,1%)	33 (62,3%)
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber : Hasil Analisis Data.

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa responden yang partisipasinya tinggi pada masyarakat lokal sebanyak 55 responden atau sekitar 59,1%, ada pula partisipasinya sedang sebanyak 38 responden atau

sekitar 40,9%. Sedangkan pada masyarakat transmigran sebanyak 33 responden berada pada kategori tinggi dengan presentasi 62,3%. Table diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat transmigran lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lokal dengan perbandingan masing-masing 59,1% dengan 62,3%.

## **2. Partisipasi dalam Bidang Tenaga**

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil pengamatan bakti atau gotog royong sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Desa, serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat.

**Tabel 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bawalipu dalam Bentuk Tenaga**

Kategori (Nilai)	Masyarakat	
	Lokal Frekuensi (Persentasi)	Transmigran Frekuensi (Persentasi)
Rendah (1 – 3)	-	12 (22,6%)
Sedang (4 – 6)	32 (34,4%)	41 (77,4%)
Tinggi (7 – 9)	61 (65,6%)	-
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber: Hasil Analisis Data.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada masyarakat lokal responden terbanyak adalah responden yang tingkat kesadarannya tinggi yakni sebanyak 61 responden atau sebesar 65,6% dan 32 responden atau sebesar 34,4% yang memiliki tingkat kesadarannya sedang. Kemudian pada masyarakat transmigran sebanyak 41 responden berada pada kategori sedang dan 12 responden berada pada kategori rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam bentuk tenaga masyarakat transmigran berada dibawah masyarakat lokal.

### **3. Partisipasi dalam Bentuk Evaluasi dan Monitoring**

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat lokal dan transmigran dalam evaluasi/monitoring dalam pembangunan Desa Bawalipu bentuk partisipasinya yaitu masyarakat ikut memonitor kesesuaian perencanaan/pelaksanaan, masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di bawah ini.



**Tabel 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bawalipu dalam Bentuk Evaluasi dan Monitoring**

Kategori (Nilai)	Masyarakat	
	Lokal Frekuensi (Persentasi)	Transmigran Frekuensi (Persentasi)
Rendah (1 – 3)	11 (11,8%)	18 (34,0%)
Sedang (4 – 6)	45 (48,4%)	35 (66,0%)
Tinggi (7 – 9)	37 (39,8%)	-
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber: Hasil Analisis Data.

Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa pada masyarakat lokal terdapat 37 responden berada pada tingkat kesadaran tinggi sebesar 39,8% dan 45 responden atau sebesar 48,4% yang memiliki tingkat kesadarannya sedang. Kemudian pada masyarakat transmigran sebanyak 35 responden berada pada kategori sedang dan 18 responden berada pada kategori rendah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran atau kemauan masyarakat transmigran berada dibawah masyarakat lokal.

#### **4. Partisipasi dalam Bentuk Pemanfaatan Hasil**

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan Desa Bawalipu bentuk partisipasinya yaitu masyarakat menilai penting keberadaan hasil-hasil pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di bawah ini.

**Tabel 9. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bawalipu dalam Bentuk Pemanfaatan Hasil**

<b>Kategori (Nilai)</b>	<b>Masyarakat</b>	
	<b>Lokal Frekuensi (Persentasi)</b>	<b>Transmigran Frekuensi (Persentasi)</b>
Rendah (1 – 4)	6 (6,5%)	2 (3,8%)
Sedang (5 – 8)	64 (68,8%)	32 (60,4%)
Tinggi (9 – 12)	23 (24,7%)	19 (35,8%)
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber: Hasil Analisis Data.

Data pada tabel di atas memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan hasil pembangunan. Pada masyarakat lokal, responden lebih banyak memberikan penilaian sedang yaitu sebanyak 64 responden dengan presentasi sebesar 68,8% begitupula pada masyarakat transmigran berada pada kategori sedang dengan jumlah responden 32 orang dengan presentasi 60,4%. Dari tabel di atas pula dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di bidang pemanfaatan hasil pada kategori “Tinggi” dimana masyarakat transmigran lebih unggul dibandingkan masyarakat lokal.

#### **E. Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Bawalipu dalam pembangunan dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk ide/pikiran, tenaga, evaluasi dan pemanfaatan yang disebutkan diatas.

Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tersebut, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10. Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal dan Transmigran di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu**

<b>Bentuk Partisipasi</b>	<b>Masyarakat (Skor)</b>	
	<b>Lokal</b>	<b>Transmigran</b>
Ide	2,5	2,6
Tenaga	2,7	1,8
Evaluasi	2,3	1,7
Pemanfaatan Hasil	2,2	2,3
<b>total skor</b>	9,7	8,4
<b>Rerata</b>	2,4	2,1

Sumber : Hasil Analisis Data.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari empat bentuk partisipasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat lokal memiliki nilai skor lebih tinggi pada bentuk partisipasi dibidang tenaga dan evaluasi dengan skor 2,7 dan 2,3, sedangkan masyarakat transmigran memiliki nilai skor lebih tinggi pada bentuk partisipasi ide dan pemanfaatan hasil dengan skor masing – masing 2,6 dan 2,3.

#### **F. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Bawalipu yaitu faktor intern

yang meliputi kesadaran dan pendidikan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah.

## 1. Faktor Interen

### a. Kesadaran

Untuk mengetahui tingkat kesadaran/kemauan masyarakat baik lokal maupun transmigran dalam pembangunan di Desa Bawalipu, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11. Tingkat Kesadaran/Kemauan Masyarakat Lokal dan Transmigrasi Dalam Pembangunan Desa Bawalipu**

Kategori (Nilai)	Masyarakat	
	Lokal Frekuensi (Persentasi)	Transmigran Frekuensi (Persentasi)
Rendah (1 – 3 )	1 (1,1%)	-
Sedang ( 4 – 6 )	50 (53,8%)	24 (45,3%)
Tinggi ( 7 – 9 )	42 (45,2%)	29 (54,7%)
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber: Hasil Analisis Data.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada masyarakat lokal responden terbanyak adalah responden yang tingkat kesadarannya sedang yakni sebanyak 50 responden atau sebesar 53,8% dan 42 orang atau sebesar 45,2% yang memiliki tingkat kesadarannya tinggi. Sedangkan pada masyarakat transmigran sebanyak 29 responden berada pada kategori tinggi atau 54,7% dan 24 responden berada pada kategori sedang atau 45,3%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran atau kemauan masyarakat transmigran berada di atas masyarakat lokal.

### b. Pendidikan

Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pendidikan masyarakat dengan tingkat partisipasinya dalam pembangunan khususnya partisipasinya dalam bentuk non fisik dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 di bawah ini.

**Tabel 12. Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat Lokal dalam Partisipasi Pemberian Ide**

Tingkat pendidikan	Partisipasi dalam Pemberian Ide			Jumlah Total
	aktif	kurang aktif	tidak aktif	
Tidak Tamat SD	2(22,2%)	7(77,8%)	-	9 (10%)
Tamat SD	10(45,5%)	12(42,9%)	-	22 (24%)
Tamat SLTP	12(57,1%)	9(42,9%)	-	21 (23%)
Tamat SLTA	20(71,4%)	8(28,6%)	-	28 (30%)
Sarjana	11(84,6%)	2(15,4%)	-	13 (13%)
<b>Jumlah</b>				93 (100%)

Sumber : Hasil Analisis Data.

**Tabel 13. Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat Transmigran dalam Partisipasi Pemberian Ide**

Tingkat pendidikan	Partisipasi dalam Pemberian Ide			Jumlah Total
	Aktif	kurang aktif	tidak aktif	
Tidak Tamat SD	4(33,3%)	8(66,7%)	-	12 (23%)
Tamat SD	8(72,7%)	3(27,3%)	-	11 (21%)
Tamat SLTP	9(56,3%)	7(43,8%)	-	16 (30%)
Tamat SLTA	8(80,0%)	2(20,0%)	-	10 (19%)
Sarjana	3(75,0%)	1(25,0%)	-	4 (7%)
<b>Jumlah</b>				53 (100%)

Sumber : Hasil Analisis Data.

Dari tabel 12 dan 13 di atas menunjukkan keterkaitan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya partisipasi non fisik ( pemberian ide-ide / saran-saran ). Dari 93 responden masyarakat lokal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan tamat SLTA dan Sarjana menjawab sangat aktif dalam memberikan buah pikirannya dalam rapat. Sedangkan dari 53 responden masyarakat transmigran yang dijadikan sampel dapat diketahui bahwa yang memiliki tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana menjawab sangat aktif dalam memberikan ide dalam rapat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan.

## **2. Faktor Ekstern (Pemerintahan)**

Masyarakat merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat / karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Untuk melihat pengaruh kepemimpinan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Bawalipu, dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 14. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dilihat Dari Faktor Kepeminpinan di Desas Bawalipu**

Kategori (Nilai)	Masyarakat	
	Lokal Frekuensi (Persentasi)	Transmigran Frekuensi (Persentasi)
Tidak Berpengaruh ( 1 – 3 )	-	-
Cukup Berpengaruh ( 4 – 6 )	17 (18,3%)	10(18,9%)
Sangat Berpengaruh ( 7 – 9 )	76 (81,7%)	43(81,1%)
<b>Total</b>	<b>93 (100%)</b>	<b>53 (100%)</b>

Sumber : Hasil Analisis Data.

Berdasarkan data pada tabel 14 diketahui bahwa masyarakat lokal yang mengatakan bahwa kepemimpinan pemerintah sangat berpengaruh terhadap partisipasi adalah 76 responden atau 81,7% dan 17 responden atau 18,3% yang mengatakan cukup berpengaruh, Sedangkan 43 responden atau 81,1% dari masyarakat transmigran yang mengatakan kepemimpinan pemerintah sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan 10 responden atau 18,9% yang mengatakan cukup berpengaruh. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.



### **G. Keterkaitan Antara Tingkat Partisipasi Masyarakat Transmigran dan Lokal dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan dalam Perspektif Islam**

Diantara semua perintah dan larangan Allah SWT, Salah satunya ialah adanya perintah untuk saling tolong menolong diantara ummat nya. Sesungguhnya sifat dan sikap ta'awun atau tolong menolong ini telah dimulai pada awal kelahiran dan perkembangan agama Islam. Dalam sejarah banyak sekali perilaku Nabi dan para sahabat, serta kaum muslimin yang berkaitan dengan sikap ta'awun. Kita ketahui, betapa Siti Khadijah dengan harta dan dorongan semangatnya telah menolong perjuangan Rasulullah saw. dalam menyiarkan ajaran Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat terutama Abu Bakar al-Shiddiq, Usman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, adalah para sahabat Nabi yang terkenal telah mengorbankan seluruh hartanya untuk menolong perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam. Begitu pula Abu Bakar al-Shiddiq menolong dengan membebaskan Bilal bin Rabah, budak yang telah masuk Islam dan mendapat penyiksaan dari majikannya.

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, manusia saling membutuhkan antara sesamanya. Orang miskin membutuhkan pertolongan dari yang kaya berupa makanan, uang, dan materi yang lainnya. Orang yang kaya pun membutuhkan pertolongan dari orang yang miskin berupa jasa, tenaga, dan sebagainya. Menolong orang bukan hanya dengan harta atau materi, tetapi bisa juga dengan tenaga, dengan ilmu, nasihat, dan sebagainya. Pada suatu hari Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat. "Tolonglah saudaramu, baik yang dianiaya orang maupun yang menganiaya!" Sahabat bertanya: "Bagaimana



cara kami menolong orang yang menganiaya?" Rasulullah saw. menjawab: "Engkau cegah dia melakukan penganiayaan. Dengan demikian engkau telah menolong orang yang menganiaya itu dari perbuatan dosa".

Jika kita sudah terbiasa menerapkan sifat ta'awun ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan senantiasa peduli terhadap kesulitan orang lain dan berusaha sedapat mungkin untuk menolongnya. Kita harus memegang prinsip islami dalam mengaplikasikan sifat saling tolong-menolong kepada sesama manusia dalam kehidupan sosial masyarakat kita, yakni terbatas pada kebaikan dan takwa. Bagaimanapun bentuk dan caranya tetapi kita tetap pegang teguh pada prinsip tersebut.





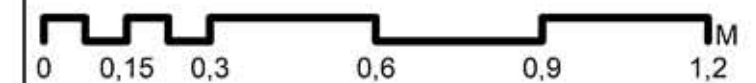
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**JUDUL PETA**

PETA SEBARAN PENDUDUK  
TRANSMIGRAN & LOKALDESA BAWALIPU  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

**SKALA**

1:22.000




**LEGENDA**

-  **Jalan Arteri Primer**
-  **Jalan Arteri Sekunder**
-  **Jalan Kolektor**
-  **Jalan Lokal**
-  **Sungai**
-  **LAUT**

**KETERANGAN**

**KAWASAN**

-  **MASYARAKAT LOKAL**
-  **MASYARAKAT TRANSMIGRAN**

**NAMA DOSEN**

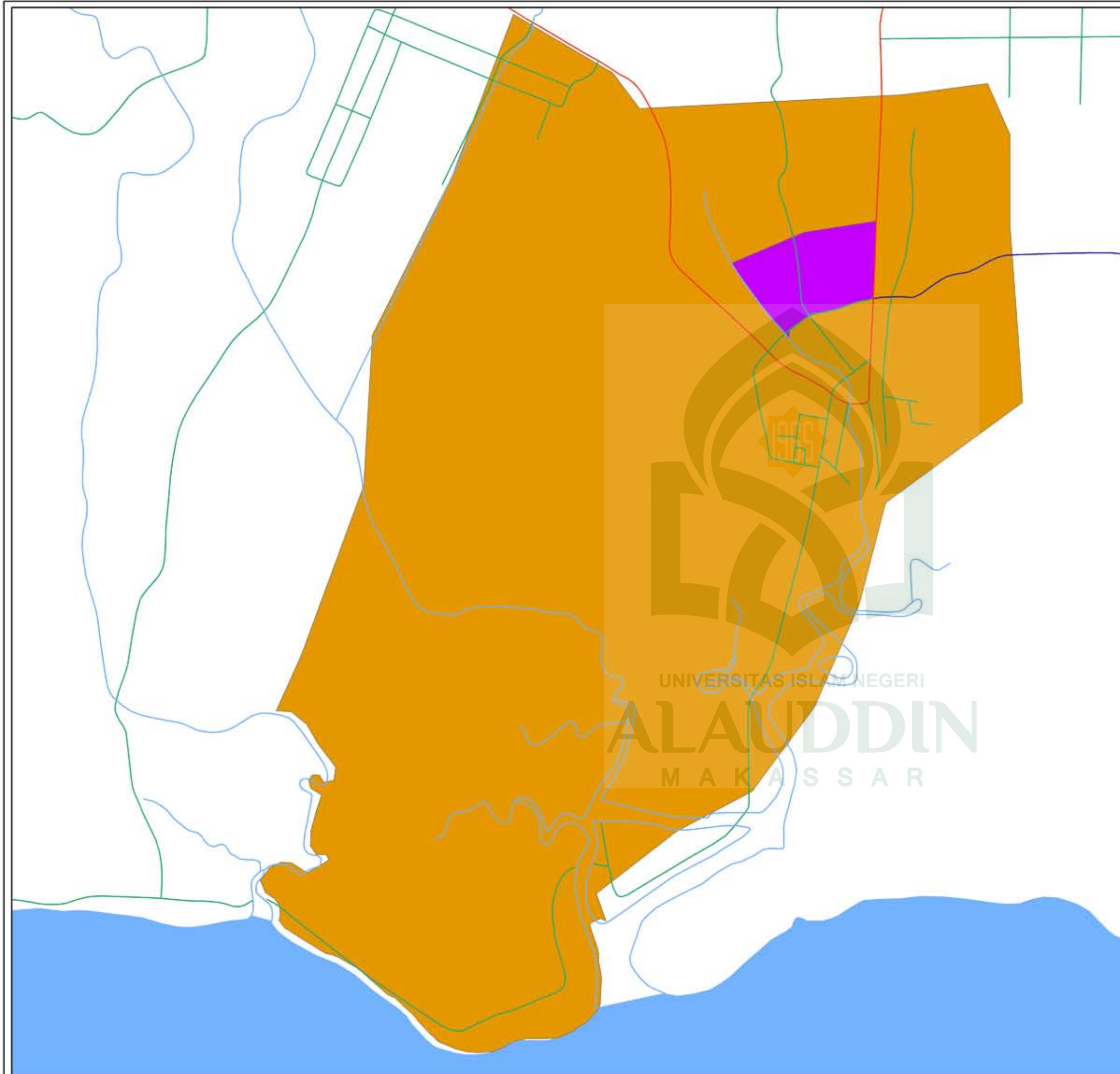
Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., MS.i  
Risma Handayani, S.IP., M.Si

**NAMA MAHASISWA**

Hendra Putra : 600112028

**SUMBER**

RTRW SULAWESI SELATAN







TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

#### JUDUL PETA

PETA ADMINISTRASI DESA BAWALIPU  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

#### SKALA

1:22.000



#### LEGENDA

— Sungai

— JALAN

LAUT

#### KETERANGAN

DESA BAWALIPU

#### NAMA DOSEN

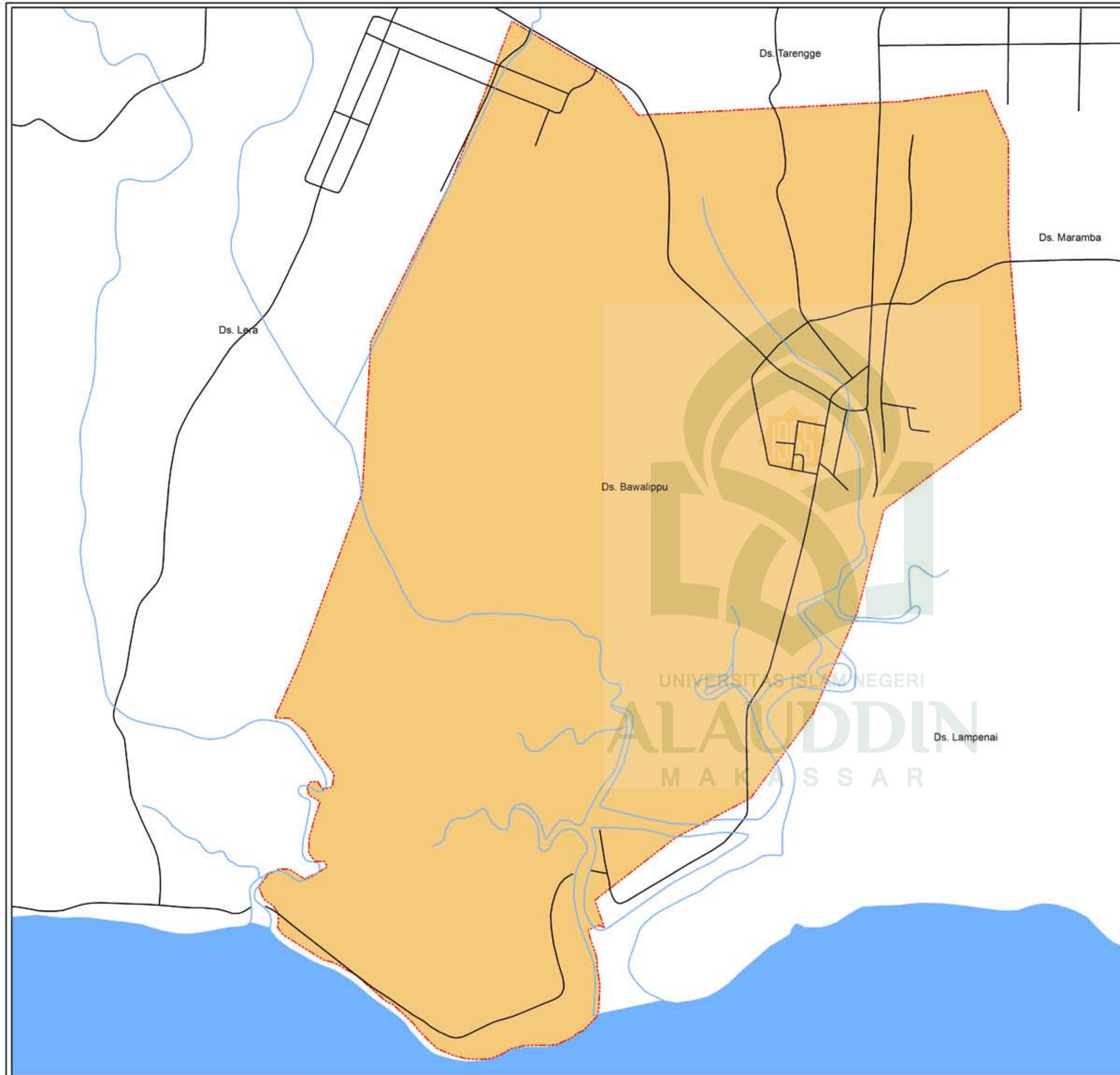
Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., MS.i  
Risma Handayani, S.IP., M.Si

#### NAMA MAHASISWA

Hendra Putra : 600112028

#### SUMBER

RTRW SULAWESI SELATAN







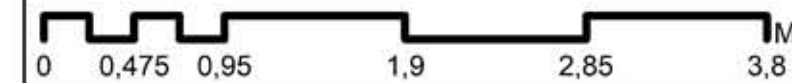
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**JUDUL PETA**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SKALA**

1:64.000



— Sungai  
**LEGENDA**  
— JALAN  
LAUT

**KETERANGAN**

- Sungai
- Ds. Bahari
  - Ds. Bawalippu
  - Ds. Cendana Hijau
  - Ds. Kalaena
  - Ds. Kanawatu
  - Ds. Karambua
  - Ds. Lampenai
  - Ds. Lera
  - Ds. Maramba
  - Ds. Tarengge

**NAMA DOSEN**

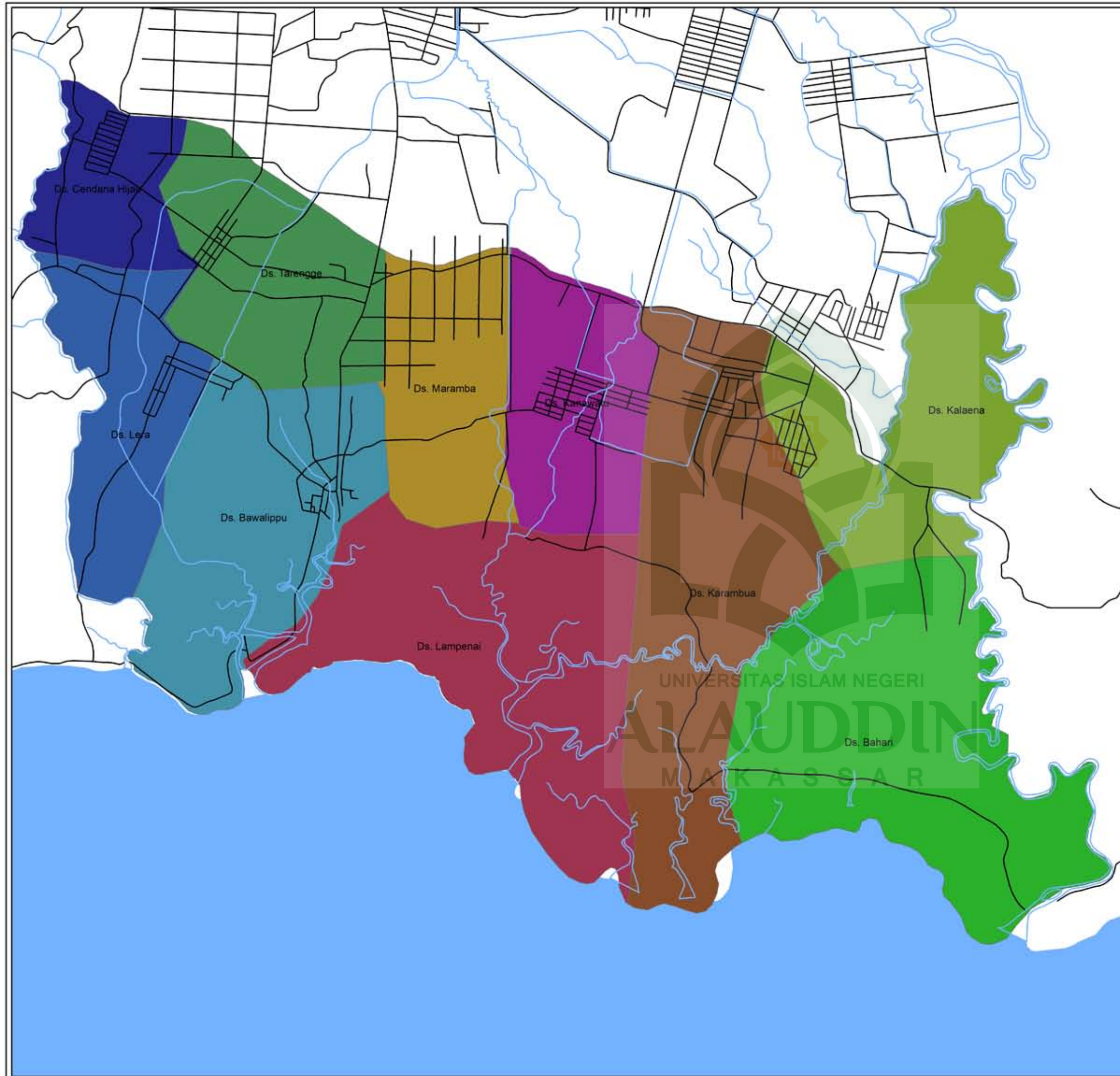
**Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., MS.i  
Risma Handayani, S.IP., M.Si**

**NAMA MAHASISWA**

**Hendra Putra : 600112028**

**SUMBER**

**RTRW SULAWESI SELATAN**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Di Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dari ke empat bentuk partisipasi (ide, tenaga, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan) tingkat partisipasi masyarakat lokal memiliki kategori tinggi dibandingkan dengan masyarakat transmigran pada bentuk tenaga dan evaluasi dengan skor masing-masing 2,7 dan 2,3. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat transmigran memiliki kategori tinggi dibandingkan lokal dalam bentuk sumbangan pemikiran dan pemanfaatan hasil dengan skor masing-masing 2,6 dan 2,3.
2. Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat di dasarkan pada tingkat kesadaran, pendidikan, suku serta sistem pemerintahan yang ada.

#### **B. Saran**

Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Di Desa Bawalipu yang kategorinya sedang, baik pada masyarakat Lokal maupun Transmigran, Maka ;

1. Perlu adanya dorongan terhadap masyarakat untuk menimbulkan kembali sifat saling tolong menolong (gotong royong) terhadap sesama baik dalam

lingkungan bertetangga maupun bukan guna untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Sistem ke pemerintahan desa harus mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat dan pemerintah desa harus saling terbuka tentang setiap kegiatan yang ingin atau telah dilaksanakan di desa.
4. Masyarakat dan pemerintah desa harus sering ikut terlibat dalam setiap kegiatan gotong royong baik dalam ruang lingkup desa, kecamatan maupun kabupaten.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S. 2005. *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Allo, G.A. 2016. *Perkiraan Pola Migrasi Antar Provinsi Di Indonesia: Pendekatan Demografi-Ekonomi*. Jurusan Ekonomi. UNEP.
- Alkadri, 2001, *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*, Pusat. Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah (BPPT), Jakarta.
- Andeeyan, R. 2014. *Studi Tentang partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. ejournal.an. 2 (4): 1938-1951.
- Arianto, 2011. *Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pulo Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Batu Utara*.
- Darminto, F. 2003. *Disourse on Public Participation in Planning*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.14/ No.1, 1-15.
- Darmawi, 2014. *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong*.
- Dewi Sawitri. 2006` *Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengembangan Lokal*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.17/ No.1 April 2006.
- Egon E. Bergel dalam Rahardjo.1999.*Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Friedman, John and Allonso. (2008). *Regional Economic Development and Planning*. Mars. MIT Press.
- Glasson J. (1977). *Pengantar perencanaan regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hartoyo, dkk.,1996, *Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa*,Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.

- Hendryk, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1(2): 612-625*
- Izhak, Fistarizma. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Ilmu Ekonomi. Universitas Haluleo.
- Kogoya, T. Olfie, B dan Laoh, E.O. 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. PPW. UNSRAT.
- Kuncoro, Mudjarad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Megawati, 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Studi Di Kotamadya Jakarta Selatan Universitas Padjadjaran.
- Melis. 2016. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Ilmu Ekono. Universitas Haluleo.
- Mutikawati. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. ejournal.an. 4 (2) : 2739 – 2752.
- Muzakkir. Suhab, S dan Mappangaja, R. 2013. Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Akselerasi Pembangunan Desa Di Kabupaten Sidenreng. PPW. UNHAS
- Ndaraha, T., 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersipakan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant D, 2005. *Analisis Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nur, I.F. 2015. Kontribusi Transmigran Dalam Pembangunan Desa Di Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. ejournal.an. 3 (1): 404-414.
- Nur, F. Bulkis, S Dan Naping, H. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa Di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. PPW. UNHAS.



- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak. B., 1992., sosiologi Pembangunan, Tarsito, Bandung.  
Peraturan Perundang: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  
Tentang Desa
- Rustiadi Ernani, Sunsun Saefulhakim, Dyah R.Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crespet Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Slamet. Y., 1999, *Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. PAU-SS, UGM, Yogyakarta..
- Sunarti, 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP
- Suwandi. 2005. Pengaruh Kejelasan Peran dan Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Sugyono. 1998, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunarti, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Tarigan Robinson, M.R.P. 2010. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.



#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hendra Putra Lahir di Wotu tanggal 13 Juni tahun 1994, ia merupakan anak ke-4 dari-4 bersaudara dari pasangan Alwi Podo dan Fati Masang yang merupakan Suku Bugis yang tinggal dan menetap di Kabupaten Luwu Timur. Ia menghabiskan masa pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 120 Campae Kecamatan Wotu pada tahun 1999-2004, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SLTP Neg. 1 Wotu pada tahun 2005-2008 dan sekolah menengah atas di SMA Neg. 1 Wotu Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2008-2011. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur SBMPTN dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 5 tahun 8 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R